

# Implikasi Keterbatasan Serapan Hasil Tambang Rakyat terhadap PAD, Daya Beli Masyarakat, dan Stabilitas Sosial-Ekonomi di Pulau Belitung

## *(Implications of the Limited Absorption of Community Mining Results on Regional Revenue, Community Purchasing Power, and Socio-Economic Stability in Belitung Island)*

Guskarnali<sup>1</sup>, Misbahul Munir<sup>2\*</sup>, Putra Pratama Saputra<sup>3</sup>, Rendy Asidiki<sup>4</sup>, Chei Milki Nugraha Kurniawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Teknik Pertambangan, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Bangka Belitung

<sup>2</sup>Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bangka Belitung

<sup>3</sup>Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung

<sup>4</sup>PT. Bukit Nunggal Perkasa

\*Korespondensi E-mail : [misbahul@ubb.ac.id](mailto:misbahul@ubb.ac.id)

### Abstrak

Pulau Belitung merupakan salah satu pulau sentra produksi timah terbesar di Indonesia yang aktivitasnya didominasi penambang rakyat di wilayah IUP PT Timah Tbk. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kondisi aktual pertambangan timah rakyat serta menganalisis implikasi keterbatasan serapan hasil tambang oleh PT Timah Tbk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), daya beli masyarakat, dan stabilitas sosial-ekonomi di Belitung. Metode kualitatif digunakan dengan observasi lapangan, wawancara mendalam terhadap 42 responden (37 penambang rakyat, 2 mitra perusahaan, 3 pemangku kebijakan), dan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif dan SWOT. Hasil menunjukkan 73,8% penambang mengharapkan penambahan kuota karena keterbatasan serapan berdampak pada ketidakstabilan pendapatan, keterlambatan pembayaran, serta mendorong praktik penjualan ke tengkulak. Penelitian mengidentifikasi empat implikasi kritis: (1) tidak ada peningkatan signifikan PAD; (2) maraknya penyelundupan bijih timah (diperkirakan 80%); (3) penurunan daya beli dan tidak tercapainya kesejahteraan sosial-ekonomi; serta (4) risiko demonstrasi gelombang kedua pasca-Oktober 2025. Rekomendasi kebijakan meliputi serapan akomodatif, penguatan kemitraan melalui koperasi desa, dan pengawasan berbasis teknologi.

**Kata kunci:** *Pertambangan rakyat, serapan timah, PAD, stabilitas sosial-ekonomi.*

### Abstract

*Belitung Island is one of Indonesia's largest tin production centers, where mining activities are dominated by community miners operating within PT Timah Tbk's Mining Business Permit area. This study aims to identify the actual conditions of community tin mining and analyze the implications of limited tin ore absorption by PT Timah Tbk on Local Original Revenue (PAD), community purchasing power, and socio-economic stability in Belitung. A qualitative method was employed through field observation, in-depth interviews with 42 respondents (37 community miners, 2 company partners, 3 policymakers), and documentation. Data analysis used descriptive and SWOT approaches. Results show that 73.8% of miners expect increased quotas because limited absorption causes income instability, payment delays, and encourages sales to middlemen. The study identifies four critical implications: (1) no significant increase in PAD; (2) widespread tin ore smuggling (estimated at 80%); (3) declining purchasing power and failure to achieve socio-economic welfare; and (4) the risk of a second wave of demonstrations after October 2025. Policy recommendations include accommodative absorption, strengthening partnerships through village cooperatives, and technology-based supervision.*

**Keywords:** *Community mining, tin absorption, PAD, socio-economic stability.*

### 1. Pendahuluan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai salah satu daerah penghasil timah terbesar di Indonesia. Eksploitasi timah telah berlangsung sejak era kolonial dan menjadi sektor utama yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah maupun nasional. Namun, secara paradoks, kekayaan sumber daya alam ini tidak serta-merta membawa kesejahteraan

bagi masyarakat lokal. Data Badan Pusat Statistik per Maret 2023 menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatatkan garis kemiskinan cenderung tinggi di Indonesia, yaitu Rp874.204 per kapita per bulan, yang mengindikasikan tingginya biaya hidup di tengah ketergantungan ekonomi masyarakat pada sektor pertambangan (WartaKota, 4 April 2024).

Aktivitas pertambangan timah di Pulau Belitung didominasi oleh penambang rakyat yang menggunakan metode sederhana. Sebagian besar dari mereka beroperasi di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki oleh PT Timah Tbk, bahkan tidak sedikit yang melakukan penambangan di kawasan lindung. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 1.000 titik tambang ilegal di Bangka Belitung, dan hampir 80% hasil timah dari daerah ini diselundupkan setiap tahunnya, yang berarti hanya 20% yang memberikan kontribusi kepada negara (MetroTV News, 2025). Kondisi ini semakin diperparah dengan maraknya praktik penyelundupan bijih timah melalui jalur laut, seperti yang berhasil digagalkan oleh TNI AL di Pantai Penyusuk, Belinyu, pada April 2026 yang melibatkan 81 karung bijih timah yang masih mengandung Logam Tanah Jarang bernilai ekonomi tinggi (Garuda TV, 2026).

Fenomena kontribusi sektor pertambangan timah yang tidak sebanding dengan kesejahteraan masyarakat bukanlah hal baru. Penelitian sebelumnya di Bangka Belitung telah mengonfirmasi berbagai dampak negatif ekstraksi timah. Nurtjahya et al. (2008) menemukan bahwa konversi lahan akibat tambang timah meningkatkan pendapatan petani hingga 95%, namun peningkatan kesejahteraan tersebut semu karena biaya pemulihan lingkungan tidak diperhitungkan. Lebih lanjut, Rahayu et al. (2023) mengungkapkan bahwa ketidaksiapan pemerintah daerah pasca perubahan UU Minerba justru memperparah marginalisasi penambang dan kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal. Dari sisi ekonomi makro, studi tentang *resource curse* di Bangka Belitung menunjukkan bahwa kekayaan timah berbanding terbalik dengan capaian kesejahteraan. Penelitian oleh Rosyida et al. (2018) juga menyoroti praktik 'partisipasi abu-abu' di tambang timah pesisir, di mana manfaat dan dampak terdistribusi tidak merata, disertai lemahnya konsultasi publik.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada tiga hal utama. *Pertama*, dari sisi fokus analisis. Berbeda dengan studi-studi terdahulu yang lebih banyak membahas dampak lingkungan atau konflik agraria, penelitian ini secara spesifik memotret implikasi keterbatasan kuota RKAB PT Timah Tbk terhadap tiga indikator ekonomi-sosial sekaligus yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), daya beli masyarakat, dan stabilitas sosial-ekonomi, yang jarang diintegrasikan dalam satu model analisis. *Kedua*, dari sisi kebaruan data dan konteks waktu, penelitian ini merekam dinamika paling mutakhir pasca kebijakan pemangkasan RKAB nasional yang berdampak pada terhambatnya rantai pasok timah dari

penambang rakyat, yang datanya diambil pada April 2026, termasuk merekam fenomena viral keresahan ibu penambang di media sosial akibat mandeknya pembelian pasir timah yang mengancam ketahanan pangan rumah tangga. *Ketiga*, dari sisi pendekatan metodologis, penelitian ini mengintegrasikan analisis SWOT dari tiga perspektif kunci (penambang, perusahaan, dan pemerintah) yang belum banyak dilakukan dalam studi pertambangan rakyat di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan penelitian merumuskan strategi solusi yang lebih implementatif dan partisipatif dibandingkan studi-studi sebelumnya yang cenderung normatif.

Permasalahan fundamental yang dihadapi penambang rakyat saat ini adalah keterbatasan kuota pembelian bijih timah oleh PT Timah Tbk yang diatur dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Kebijakan pemangkasan kuota produksi mineral secara nasional membawa perubahan fundamental dan berpotensi menciptakan ketidakpastian iklim usaha serta ancaman terhadap penyerapan tenaga kerja. Dalam konteks pertambangan timah di Belitung, keterbatasan kuota RKAB PT Timah Tbk berdampak langsung pada ketidakmampuan perusahaan menyerap seluruh hasil produksi bijih timah dari masyarakat. Pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah mengungkapkan bahwa pembahasan peningkatan RKAB PT Timah sedang dilakukan, dengan arahan Presiden untuk mendorong BUMN SDA agar lebih kuat dan berdaya saing (Bloomberg Technoz, 2025).

Dampak dari ketidaksesuaian antara perencanaan dalam RKAB dengan realitas di lapangan sangat kompleks. Penurunan kemampuan serapan bijih timah dari masyarakat menyebabkan ketidakpastian ekonomi bagi penambang rakyat yang menggantungkan hidup pada sektor ini. Selain itu, muncul fenomena peralihan pekerjaan warga dari sektor pertanian ke pertambangan ketika harga timah naik, yang justru memperkuat ketergantungan ekonomi pada satu sektor (WartaKota, 4 April 2024). Konflik sosial juga tidak terhindarkan; seorang Kepala Desa di Bangka memilih mundur dari jabatannya karena tekanan dari warganya yang terbelah antara pro dan kontra terhadap aktivitas tambang ilegal di wilayahnya (Kompas.com, 2026). Ketegangan ini menunjukkan betapa dalamnya akar permasalahan yang menghubungkan kebijakan kuota dengan dinamika sosial masyarakat.

Penertiban tambang ilegal terus dilakukan oleh aparat, seperti penggerebekan di kawasan hutan produksi Belinyu yang menyita dua unit ekskavator dan mesin dompeng (BeritaSatu.com, 2026). Namun, penertiban tanpa diikuti solusi

ekonomi yang berkelanjutan hanya akan menjadi siklus yang tidak pernah berakhir. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi kondisi aktual kegiatan pertambangan timah rakyat di Pulau Belitung; (2) menganalisis implikasi keterbatasan serapan hasil tambang rakyat oleh PT Timah Tbk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), daya beli masyarakat, dan stabilitas sosial-ekonomi di Belitung; serta (3) merumuskan alternatif strategi penyelesaian masalah menggunakan pendekatan analisis SWOT. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan bagi pemangku kepentingan dalam upaya memutus paradoks kemiskinan di negeri timah serta mewujudkan tata kelola pertambangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## 2. Metode

### 2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena secara holistik dalam konteks alaminya serta menggali makna yang muncul dari pengalaman partisipan (Creswell & Poth, 2018). Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Pendekatan ini sangat sesuai untuk meneliti kondisi pertambangan timah rakyat di Pulau Belitung karena fenomena yang diteliti bersifat kompleks dan melibatkan berbagai perspektif dari penambang rakyat, mitra perusahaan, hingga pemangku kebijakan.

### 2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan tiga metode, yaitu observasi lapangan, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi. Observasi lapangan dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap aktivitas penambangan rakyat, kondisi lingkungan, serta interaksi sosial penambang selama 5 hari (6-10 April 2026) di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Wawancara mendalam menggunakan metode semi-terstruktur dengan pedoman wawancara, yang menurut Edwards & Holland (2023) memberikan keseimbangan antara konsistensi pertanyaan dan fleksibilitas menggali informasi mendalam. Partisipan berjumlah 42 responden: 37 penambang rakyat (22 Belitung, 15 Belitung Timur), 2 Penanggungjawab Operasional mitra PT Timah Tbk, serta 3 pemangku kebijakan (Wakil Bupati, Ketua dan anggota DPRD Belitung Timur). Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan foto kegiatan

dan dokumen pendukung seperti profil desa dan data DTKS.

### 2.3 Metode Analisis Data

Analisis data menggunakan dua metode yaitu analisis deskriptif dan analisis SWOT. Analisis deskriptif mengikuti kerangka data analysis spiral dari Creswell & Poth (2018) yang meliputi: mengorganisasi data, membaca dan membuat memo, mendeskripsikan kode ke dalam tema, serta mengembangkan interpretasi. Proses analisis melalui tahapan koding terbuka (*open coding*), koding aksial (*axial coding*), hingga koding selektif (*selective coding*) (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Data dari kuesioner terukur disajikan dalam diagram lingkaran dan narasi deskriptif.

Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal (*kekuatan/strengths* dan kelemahan atau *weaknesses*) serta faktor eksternal (*peluang/opportunities* dan ancaman/*threats*) yang mempengaruhi kegiatan pertambangan timah rakyat. Penggunaan SWOT dalam penelitian kualitatif telah terbukti efektif untuk menganalisis permasalahan kompleks. Ahn, Kim, & Lee (2025) menggunakan pendekatan SWOT kualitatif untuk mengeksplorasi pengalaman sukarelawan medis dan menghasilkan 125 kode bermakna ke dalam 14 tema utama. Hamenoo, Baah-Ennumh, & King (2025) tentang skema pertambangan komunitas di Ghana menggunakan SWOT kualitatif untuk menganalisis kontribusi pertambangan rakyat terhadap pembangunan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, analisis SWOT dilakukan dari tiga perspektif (penambang rakyat, PT Timah Tbk, dan pemangku kebijakan) yang diintegrasikan ke dalam strategi kombinasi SO, WO, ST, dan WT. Proses analisis mencakup identifikasi faktor internal (potensi produksi, keterbatasan kuota RKAB, legalitas) dan faktor eksternal (revisi RKAB, konflik sosial, tambang ilegal, kerusakan lingkungan). Lincoln & Guba (1985) menekankan bahwa kredibilitas data kualitatif diperoleh melalui triangulasi metode, perpanjangan keikutsertaan, dan member checking.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Karakteristik Responden Penambang Rakyat

Penelitian ini melibatkan 37 responden penambang rakyat yang tersebar di Kabupaten Belitung (22 orang) dan Kabupaten Belitung Timur (15 orang). Karakteristik responden disajikan pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1, mayoritas responden (75,7%) menggantungkan hidupnya pada sektor pertambangan sebagai pekerjaan utama,

sementara 54,1% tidak memiliki pekerjaan alternatif di luar tambang. Fakta ini menunjukkan tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap aktivitas pertambangan timah.

Menariknya, meskipun 73,8% responden sangat berharap adanya penambahan kuota RKAB, sebanyak 64,9% responden mengaku tidak mengetahui secara pasti adanya kebijakan pembatasan kuota dari PT Timah Tbk. Hal ini mengindikasikan lemahnya sosialisasi kebijakan pemerintah dan perusahaan kepada penambang rakyat di tingkat akar rumput. Kondisi ini memperkuat temuan Hamenoo et al. (2025) bahwa salah satu kelemahan utama skema pertambangan komunitas di berbagai negara adalah rendahnya literasi kebijakan di kalangan penambang kecil.

Selain itu, 64,9% responden menyatakan bahwa kesulitan menjual bijih timah sangat mempengaruhi penurunan kesejahteraan mereka. Hal ini dikonfirmasi oleh data wawancara yang menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran dari PT Timah Tbk dapat mencapai tiga bulan, sehingga penambang terpaksa menjual ke tengkulak dengan selisih harga Rp10.000–Rp80.000 per kilogram lebih rendah dari harga resmi.

### 3.2 Analisis SWOT Keterbatasan Kuota RKAB PT Timah Tbk

Hasil observasi lapangan, wawancara mendalam dengan 42 responden, serta studi dokumentasi, disusun analisis SWOT dari tiga perspektif pemangku kepentingan. Tabel 2 menyajikan faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang teridentifikasi.

### 3.3 Implikasi Keterbatasan Serapan Hasil Tambang Rakyat terhadap PAD, Daya Beli Masyarakat, dan Stabilitas Sosial-Ekonomi

Matriks SWOT yang ditunjukkan pada Tabel 2, khususnya pada komponen Ancaman (*Threats*), terdapat empat implikasi kritis yang perlu menjadi perhatian utama pemangku kebijakan apabila keterbatasan serapan hasil tambang rakyat oleh PT Timah Tbk tidak segera diatasi. Keempat implikasi ini saling terkait dan berpotensi menciptakan efek domino yang memperparah paradoks kemiskinan di negeri timah.

*Pertama*, tidak adanya peningkatan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai dengan pernyataan Wakil Bupati Belitung Timur (wawancara, 8 April 2026), keterlambatan administrasi dan keterbatasan serapan berdampak luas pada penurunan PAD karena aktivitas penjualan bijih timah tidak tercatat secara resmi. Padahal, sektor pertambangan merupakan tulang punggung PAD Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Rendahnya PAD

pada gilirannya membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

*Kedua*, munculnya praktik penyelundupan bijih timah di luar ekosistem PT Timah dan mitranya. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa hampir 80% hasil timah dari Bangka Belitung diselundupkan setiap tahunnya (MetroTV News, 2025). Kondisi ini akan semakin memburuk jika kuota resmi tidak mampu menyerap produksi masyarakat. Bukti empiris dari lapangan menunjukkan bahwa ketika PT Timah menutup pintu pembelian, penambang tidak punya pilihan selain menjual ke tengkulak yang kemudian menyalurkannya ke jaringan penyelundupan. Baru-baru ini, TNI AL berhasil menggagalkan penyelundupan 81 karung bijih timah yang masih mengandung Logam Tanah Jarang bernilai ekonomi tinggi di Pantai Penyusuk, Belinyu (Garuda TV, 2026), membuktikan bahwa jaringan ilegal ini sangat masif dan terorganisir. Penyelundupan ini tidak hanya merugikan negara tetapi juga memperkuat struktur ekonomi gelap yang eksploitatif terhadap penambang kecil.

*Ketiga*, terhambatnya ekonomi masyarakat yang berdampak pada penurunan daya beli, sehingga tidak tercapainya kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Data survei menunjukkan bahwa 64,9% responden menyatakan kesejahteraan mereka sangat menurun akibat kesulitan menjual bijih timah. Penurunan daya beli masyarakat penambang akan berdampak berganda pada sektor UMKM lokal, karena permintaan terhadap barang dan jasa sehari-hari menurun, yang pada akhirnya memicu kontraksi ekonomi di tingkat desa. WartaKota, (4 April 2024) mencatat bahwa paradoksnya, masyarakat di daerah penghasil timah justru hidup di garis kemiskinan dengan tingkat putus sekolah yang tinggi. Dengan kata lain, ancaman ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan yang sulit diputus tanpa intervensi kebijakan yang terintegrasi. Kesejahteraan sosial-ekonomi yang dimaksud mencakup tidak hanya pendapatan, tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial dasar lainnya.

*Keempat*, risiko munculnya demonstrasi gelombang kedua pasca Oktober 2025. Pemberitaan media mengindikasikan keresahan di kalangan penambang rakyat di Belitung yang semakin memuncak. Aktivitas "meja goyang" (tempat transaksi jual beli timah) lumpuh akibat tersendatnya pembayaran dan isu revisi kebijakan serapan. Seorang Kepala Desa di Bangka bahkan memilih mundur dari jabatannya karena tekanan dari warganya yang terbelah antara pro dan kontra terhadap aktivitas tambang ilegal di wilayahnya (Kompas.com, 2026). Jika ketegangan ini tidak dikelola dengan baik dan

aspirasi masyarakat tidak diakomodasi melalui kebijakan yang berpihak, bukan tidak mungkin akan terjadi gelombang demonstrasi besar yang mengganggu stabilitas sosial dan keamanan daerah. Stabilitas sosial yang terganggu pada gilirannya akan menurunkan iklim investasi dan menghambat pembangunan ekonomi jangka panjang.

Dengan demikian, keempat implikasi di atas (rendahnya PAD, maraknya penyelundupan, menurunnya daya beli, dan ancaman demonstrasi) saling terkait dalam sebuah sistem yang memperkuat paradoks kemiskinan di negeri timah sehingga perlu intervensi kebijakan yang holistik dan terintegrasi.

### 3.4 Strategi Berdasarkan Analisis SWOT

Identifikasi komponen SWOT pada Tabel 2, penelitian ini merumuskan strategi kombinasi untuk mengatasi permasalahan keterbatasan kuota RKAB:

**Strategi SO (Strength - Opportunity):** Perusahaan memanfaatkan legalitas penuh untuk menyerap bijih timah penambang rakyat melalui skema kemitraan resmi (Koperasi Merah Putih di setiap kecamatan). Pemerintah membuka ruang revisi RKAB berbasis data yang akuntabel dan transparan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Strategi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat BUMN SDA agar lebih berdaya saing (Bloomberg Technoz, 2025).

**Strategi WO (Weakness-Opportunity):** Masyarakat difasilitasi untuk masuk ke dalam skema legal/kemitraan dengan bantuan pendampingan dari pemerintah daerah.

Perusahaan meningkatkan kapasitas penerimaan dan pengolahan bijih timah dengan melakukan investasi pada fasilitas *smelter* tambahan. Pemerintah perlu menyederhanakan birokrasi perizinan tambang rakyat agar penambang kecil memiliki kepastian hukum.

**Strategi ST (Strength-Threat):** Pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengendalikan konflik sosial yang terjadi di masyarakat dengan pendekatan dialogis dan penyelesaian berbasis kearifan lokal. Perusahaan menjaga kepatuhan regulasi untuk menghindari sanksi sekaligus mengedukasi masyarakat tentang bahaya tambang ilegal dan penyelundupan.

**Strategi WT (Weakness-Threat):** Penertiban tambang ilegal dilakukan secara bertahap dengan memberikan ruang bagi penambang rakyat untuk beroperasi di bawah regulasi PT Timah Tbk sebagai mitra resmi. Peningkatan pengawasan berbasis teknologi (satelit, drone) terhadap kegiatan penambangan dan perolehan hasil bijih timah perlu diimplementasikan untuk mencegah kebocoran produksi ke jaringan ilegal.

Mulya et al. (2026) menegaskan bahwa integrasi analisis SWOT dengan pendekatan partisipatif menghasilkan formulasi strategi yang lebih implementatif karena melibatkan perspektif seluruh pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, keberhasilan implementasi strategi sangat bergantung pada kemauan politik pemerintah pusat untuk memberikan diskresi kebijakan terkait RKAB di wilayah Pulau Belitung, mengingat karakteristik tambang rakyat dan komoditas timah berbeda dengan komoditas mineral lainnya.

Tabel 1. Karakteristik Responden Penambang Rakyat di Pulau Belitung

Karakteristik	Kategori	Jumlah (n=37)	Persentase (%)
<b>Lokasi</b>	Kabupaten Belitung	22	59,5
	Kabupaten Belitung Timur	15	40,5
<b>Pekerjaan Utama</b>	Penambang	28	75,7
	Lainnya (petani/nelayan)	9	24,3
<b>Pengetahuan tentang pembatasan kuota</b>	Mengetahui	13	35,1
	Tidak mengetahui	24	64,9
<b>Dampak pembatasan kuota</b>	Berdampak langsung	11	29,7
	Tidak berdampak langsung	15	40,5
<b>Harapan penambahan kuota RKAB</b>	Tidak menjawab	11	29,7
	Sangat berharap	27	73,8
	Cukup berharap	7	18,9
<b>Memiliki pekerjaan alternatif</b>	Tidak berharap	3	8,1
	Ya	17	45,9
<b>Kesejahteraan menurun akibat susah menjual</b>	Tidak	20	54,1
	Sangat mempengaruhi	24	64,9
	Sedikit mempengaruhi	10	27,0
	Tidak mempengaruhi	3	8,1

Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2026

Tabel 2. Analisis SWOT Pertambangan Timah Rakyat di Pulau Belitung

<b>STRENGTHS (S)</b>	<b>WEAKNESSES (W)</b>
Dari sisi penambang Rakyat, memiliki fleksibilitas produksi tinggi, jumlah tenaga kerja besar, penguasaan lokasi tambang lokal	Dari sisi penambang Rakyat, tidak memiliki legalitas lengkap, akses terbatas ke pasar resmi, teknologi rendah berdampak lingkungan tinggi, ketergantungan tinggi pada PT Timah sebagai pembeli tunggal
Dari sisi PT Timah Tbk, memiliki IUP dan legalitas penuh, akses pasar global & fasilitas pengolahan, dukungan pemerintah (BUMN)	Dari sisi PT Timah Tbk, terikat ketat pada RKAB (tidak fleksibel), kapasitas pengolahan terbatas, ketergantungan pada pasokan eksternal dari masyarakat, rentan terhadap tekanan sosial lokal
Dari sisi pemerintah, memiliki kewenangan penuh dalam pengaturan RKAB, pengendali kebijakan sektor minerba, memiliki instrumen hukum dan pengawasan	Dari sisi pemerintah, keterbatasan pengawasan di lapangan, data real-time tidak selalu akurat, koordinasi pusat-daerah tidak sinkron
<b>OPPORTUNITIES (O)</b>	<b>THREATS (T)</b>
Program kemitraan dengan perusahaan (Koperasi Merah Putih), legalisasi tambang rakyat, kenaikan harga timah global, revisi RKAB optimalisasi produksi	Pembatasan kuota RKAB menyebabkan bijih timah tidak terserap, penertiban tambang ilegal yang represif, fluktuasi harga global, ketergantungan ekonomi pada satu sektor dan tidak adanya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
Peningkatan efisiensi operasional PT Timah, stabilisasi rantai pasok, optimalisasi penerimaan negara, perbaikan tata kelola pertambangan berbasis data	Konflik sosial dengan masyarakat, tekanan politik daerah, aktivitas tambang ilegal di wilayah IUP, risiko sanksi jika melanggar regulasi dan risiko munculnya demonstrasi jilid 2 Pasca Oktober 2025
Penguatan kebijakan berbasis data, penataan tambang rakyat secara terstruktur	Meningkatnya tambang ilegal, tekanan ekonomi masyarakat lokal yang berdampak pada penurunan daya beli dan tidak tercapainya kesejahteraan sosial masyarakat

Sumber: Hasil Analisis SWOT (Data Lapangan, 2026) dikombinasikan dengan perspektif

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai paradoks kemiskinan di negeri timah serta implikasi keterbatasan penerimaan hasil tambang rakyat di Pulau Belitung, menunjukkan aktivitas pertambangan di lapangan didominasi oleh penambang rakyat yang menghasilkan bijih timah dalam jumlah signifikan, namun belum terintegrasi secara optimal dengan kebijakan dari PT Timah Tbk. Ketidaksesuaian antara kapasitas produksi riil di lapangan dengan kuota resmi perusahaan (RKAB) menjadi fenomena yang berulang terjadi di Pulau Belitung. Hal ini menyebabkan terganggunya rantai pasok yang berdampak langsung pada ketidakstabilan pendapatan penambang, keterlambatan pembayaran, serta mendorong praktik penjualan ke tengkulak yang merugikan. Sebanyak 73,8% responden menyatakan sangat berharap adanya penambahan kuota RKAB PT. Timah Tbk, sementara 64,9% merasakan penurunan kesejahteraan akibat kesulitan menjual hasil tambang.

Penelitian ini mengidentifikasi empat implikasi utama jika keterbatasan RKAB PT. Timah Tbk tidak diatasi, yang sekaligus menjawab paradoks

kemiskinan di wilayah penghasil timah: (1) Tidak adanya peningkatan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena aktivitas penjualan tidak tercatat resmi; (2) Maraknya praktik penyelundupan bijih timah di luar rantai pasok PT Timah Tbk dan mitranya yang saat ini diperkirakan mencapai 80% dari total produksi; (3) Terhambatnya ekonomi masyarakat yang berdampak pada penurunan daya beli, sehingga target kesejahteraan sosial-ekonomi sulit tercapai; serta (4) Potensi munculnya demonstrasi gelombang kedua pasca Oktober 2025 akibat keresahan sosial yang terus memuncak. Oleh karena itu, untuk memutus paradoks kemiskinan di negeri timah, penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan khusus yang akomodatif diberikan ke PT. Timah Tbk terhadap produksi hasil bijih timah dari penambang rakyat, penguatan skema kemitraan melalui Koperasi Merah Putih atau BUMDes di setiap Kecamatan/ Desa, serta peningkatan pengawasan berbasis teknologi untuk mencegah praktek jual-beli hasil bijih timah secara ilegal.

## Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh enumerator dan narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, serta memberikan informasi sehingga proses pengambilan data lapangan dapat berjalan dengan lancar.

## Daftar Pustaka

- Ahn, J., Kim, N., & Lee, D. (2025). *Experiences of nurses volunteering at Saemangeum Jamboree: A qualitative analysis of strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Journal of Korean Association for Qualitative Research*, 10(2), 138-151.
- BeritaSatu.com. (2026, April 24). Tambang timah ilegal di Bangka digerebek, alat berat disita. BeritaSatu.com. <https://www.beritasatu.com/>
- Bloomberg Technoz. (2025, September 5). Rapat dengan Prabowo, Bahlil singgung RKAB PT Timah (TINS). <https://www.bloombergentechnoz.com/>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Edwards, R., & Holland, J. (2023). *Qualitative interviewing: Research methods*. Bloomsbury Academic.
- Garuda TV. (2026, April 21). TNI AL gagalkan penyelundupan 81 karung bijih timah dan logam tanah jarang di Babel. <https://garuda.tv/>
- Hamenoo, S. V. Q., Baah-Ennumh, T. Y., & King, R. S. (2025). *The evolving paradigm of community mining schemes in Ghana: Prospects and lessons for other mining jurisdictions in Africa. African Journal on Land Policy and Geospatial Sciences*, 8(3), 499-522.
- Kompas.com. (2026, Maret 27). Dilema tambang timah ilegal, kades di Bangka pilih mundur: Warga terbelah, ada yang minta dibakar. <https://regional.kompas.com/>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- MetroTV News. (2025, September 30). Presiden Prabowo janji berantas tambang ilegal di Bangka Belitung. MetroTV News. <https://www.metrotvnews.com/>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mulya, S. P., Pravitasari, A. E., Putra, A. S., Rosandi, V. B., Wulandari, S., Wahid, M., & Fahrizal, M. (2025). *Integrating SWOT-QCA for determining subregion strategy in the economic sector. Evaluation and Program Planning*, 102750.
- Nurtjahya, E., Agustina, S. P. F., & Putri, W. A. E. (2008). Neraca ekologi penambangan timah di Pulau Bangka studi kasus pengalihan fungsi lahan di ekosistem darat. *Berkala Penelitian Hayati*, 14(1), 29-38.
- Rahayu, D. P., Faisal, Darwance, & Ferdian, K. J. (2023). *Environmental and social injustice: Impact and sustainability of small scale tin mining under Indonesia's new mineral and coal regulation. Cepalo*, 7(2), 123-136.
- Rosyida, I., Khan, W., & Sasaoka, M. (2018). *The 'grey participation' in coastal tin mining in Bangka Island, Indonesia. The Extractive Industries and Society*, 5(4), 477-485.
- WartaKota. (2024, April 4). Berbanding terbalik, timah justru buat warga Bangka hidup di garis kemiskinan dan putus sekolah. <https://wartakota.tribunnews.com/>